

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JOSHUA SATRIA WIJAYA
NPP. 29.1079

*Asdaf Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email :
joshuasatriawijaya@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The uneven development in the Basic Infrastructure Services and Regional Connectivity sector is one of the causes of the inequality in regional welfare growth. Road conditions in Gunung Mas Regency, only as much as 25.3 percent or 186.93 km of roads that have good condition, while 17.44 percent are in moderate condition, 34.77 percent are in damaged condition and the rest are severely damaged by 22,50 percent. **Purpose** for effectiveness in the administration of the local government of Gunung Mas Regency, to identify and analyze the supporting factors and inhibiting factors of the effectiveness of the local government of Gunung Mas Regency, to identify and analyze efforts to overcome the factors inhibiting the effectiveness of the local government of Gunung Mas Regency. **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation **Result** The quality level of the effectiveness of local government administration in Gunung Mas Regency is good and there is no doubt that although there were some obstacles that were found, they did not significantly affect the course of the programs that had been compiled. At the implementation stage, local government administration is compiled and regulated based on the program that has been listed in the strategic plan in the RPJDM of Gunung Mas Regency for 2019-2024. **Conclusion:** the data that the authors get, the authors obtain information that the effectiveness of governance carried out by the Regional Development Planning and Development Research Agency of Gunung Mas Regency is optimal but the final result still has several obstacles. **Keywords:** Effectiveness, Local government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). belum meratanya pembangunan pada sektor Layanan infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah adalah salah satu penyebab adanya ketimpangan pertumbuhan kesejahteraan daerah. Kondisi jalan di Kabupaten Gunung Mas, hanya sebanyak 25,3 persen atau 186,93 km jalan yang memiliki kondisi baik, sedangkan sebanyak 17,44 persen berada pada kondisi sedang, 34,77 persen berada pada kondisi rusak dan sisanya mengalami kerusakan berat sebesar 22,50 persen. **Tujuan** untuk efektivitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk mengetahui dan menganalisa upaya dalam mengatasi faktor penghambat efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Tingkat kualitas efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Gunung Mas sudah baik dan tidak diragukan lagi meski ada terdapat beberapa kendala yang ditemukan namun tidak terlalu mempengaruhi jalannya program yang telah di susun. Pada tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun dan diatur berdasarkan program yang sudah tercantum dalam rencana strategis pada RPJDM Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024. **Kesimpulan:** data yang penulis dapatkan, penulis memperoleh informasi bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas sudah optimal akan tetapi hasil akhir masih terdapat beberapa kendala.

Kata kunci: Efektivitas, Pemerintah daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbanyak di seluruh dunia yang terdiri atas 17.504 pulau, Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 daerah dengan jumlah 416 kabupaten serta 98 kota. Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pengelolaan bersama, serta menganut asas yang seluas-luasnya dalam kesatuan sistem nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan". Konsekuensi dari realisasi Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka tiap daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan pembangunan secara luas, nyata serta dapat dipertanggungjawabkan, kesuksesan dari sebuah daerah dalam pemanfaatan peningkatan kewenangan ini akan sangat dipengaruhi oleh baiknya tingkat kemampuan dan kualitas tenaga dan kinerja dari perangkat daerah yang ada. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harusnya mampu ditingkatkan dengan mencermati aspek-aspek ikatan antar susunan pemerintahan serta pemerintahan daerah, kemampuan dan berbagai perbedaan daerah, peluang serta tantangan dengan membagikan kewenangan yang sebesar-besarnya kepada wilayah yang diiringi dengan pemberian hak serta kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam sistem pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam upaya pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terkoordinasi antar pelaku pembangunan, maka di Indonesia telah membuat suatu institusi perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan. Bappedalitbang memiliki kedudukan sebagai pendukung pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan di awal adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Dalam hal untuk menggerakkan kegiatan pembangunan secara sistematis, efektif dan berjenjang hanya dapat

direalisasikan jika adanya arah dan tahapan pembangunan secara rinci. Badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan (Bappedalitbang) sebagai badan yang membuat rumusan strategi pembangunan harus memperhatikan situasi serta kondisi umum daerah dalam potensi dan keterlibatan dari masyarakat dalam proses terciptanya perencanaan pembangunan yang baik, tujuan utama dari perencanaan pembangunan ialah agar dapat disesuaikan atas dasar aspirasi seluruh unsur masyarakat. Pengelolaan potensi sumber daya daerah merupakan realisasi pengejawantahan dirumuskannya sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah dalam efisiensi pembangunan nasional. Keselarasan antara kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, secara umum masih belum bisa diwujudkan sepenuhnya. Kondisi inipun dapat dilihat dengan masih banyaknya kebijakan dibuatnya program dan kegiatan pembangunan masih belum sesuai dengan apa yang diperlukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berjudul **“Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Belum meratanya pembangunan pada sektor Layanan infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah adalah salah satu penyebab adanya ketimpangan pertumbuhan kesejahteraan daerah. Kondisi jalan di Kabupaten Gunung Mas, hanya sebanyak 25,3 persen atau 186,93 km jalan yang memiliki kondisi baik, sedangkan sebanyak 17,44 persen berada pada kondisi sedang, 34,77 persen berada pada kondisi rusak dan sisanya mengalami kerusakan berat sebesar 22,50 persen. Dari keseluruhan jalan sepanjang 738.992 km Namun hanya 29 persen atau 215 km sudah melalui tahap pengaspalan, sedangkan sisanya masih berupa tanah dan kerikil. Hal ini perlu diperkuat lagi dengan adanya upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk meningkatkan kualitas jalan untuk memudahkan aksesibilitas antar wilayah sebagai salah satu motor penggerak pemerataan pembangunan dapat menjadi lebih mudah. Keselarasan antara kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, secara umum masih belum bisa diwujudkan sepenuhnya. Kondisi inipun dapat dilihat dengan masih banyaknya kebijakan dibuatnya program dan kegiatan pembangunan masih belum sesuai dengan apa yang diperlukan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Anjely Mira Kogoya (2017) dengan judul “Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Konflik Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.menggunakan pendekatan yuridis normatif meneliti bahwa relasi kausalitas mengingat kekhususan yang dimiliki DIY. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Pencapaian dari nilai produktivitas pemerintah daerah yang diukur melalui tingkat realisasi program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah Kabupaten Tolikara, masih belum optimal. Kedua, Adius Faroqi, Hasbullah Malau (2020) dengan judul” Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Data” . menggunakan metode yuridis normatif meneliti bahwa Efektivitas Nagari bahwasanya BPRN Tapi Selo belum efektif karena dapat dilihat dari beberapa indikator; Indikator input, BPRN Nagari Tapi Selo hanya memiliki dana, sumber daya manusia, dan waktu. Indikator process, ketepatan dan keakuratan Kinerja BPRN Tapi kinerja dari kegiatan BPRN telah tercapai karena bisa terciptanya peraturan nagari dan APBN Nagari, sedangkan kecepatan BPRN belum maksimal. Indikator output, melakukan kegiatan musyawarah dengan

wali nagari memiliki peraturan nagari anggaran nagari penetapan APBNagari. Indikator outcomes, BPRN Tapi Selo baru menghasilkan hasil tentang dan kegiatan jangka pendek berbentuk peraturan nagari dan APBNagari yang belum mencakup kepentingan banyak di hak, untuk kegiatan jangka menengahnya belum ada. Indikator benefit, manfaat dari kegiatan jangka pendek adalah niagari mendapatkan anggaran nigari dari hasil penetapan APBNagari, sedangkan manfaat jangka menengah belum dirasakan. Indikator impact, kegiatan dari BPRN memiliki dampak positif dan kegiatan BPRN Tapi Selo tidak ada yang merugikan nagari. Berdasarkan aspek efektifitas, aspek tugas dan fungsi. BPRN Tapi Selo telak melaksanakannya dan beberapa yang belum terlaksana dengan baik Ketiga Ariel- Sharon- Sumenge (2013) dengan judul” Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Bappeda Minahasa Selatan”, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif meneliti bahwa Tingkat- dan- kriteria Efektifitas Anggaran Belanja Bappeda Minahasa Selatan tahun 2008 – 2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas paling tinggi terjadi pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2011. Anggaran belanja pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 dapat dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011, keefektifitasannya kurang akibat anggaran yang berbeda jauh dari target anggaran yang harus dicapai. Perbedaan terjadi akibat adanya serangkaian kegiatan yang dianggarkan, tetapi tidak dilaksanakan. Namun, kegiatan lain yang sudah dianggarkan, dilaksanakan secara efektif. Kabupaten Minahasa Selatan menilai, bahwa kegiatan yang sudah direncanakan telah terealisasi dan sesuai dengan tujuan pencapaian, maka program tersebut dapat dikatakan efektif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di Lokus Penulis.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini diantaranya Mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Simangunsong (2019: 232) dalam bukunya berjudul Metodologi Penelitian bahwa “metode penelitian kualitatif pemerintahan, data didapat dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, diskusi terfokus dan dimantapkan dengan triangulasi.” . Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

3.1.1 Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan tahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

3.1.1.1 Kurun Waktu

Kurun Waktu merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Tercapainya sebuah tujuan dan sasaran tentu harus di dukung oleh waktu yang mencukupi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif. Dalam pelaksanaannya penulis hanya berhasil mendapatkan informasi dari 3 (tiga) orang informan yang ada dalam pedoman wawancara terdapat 9 (sembilan) informan karena adanya keterbatasan waktu dan situasi dilapangan untuk menjadi data primer dalam menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. tingkat kualitas efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Gunung Mas sudah baik dan tidak diragukan lagi meski ada terdapat beberapa kendala yang ditemukan namun tidak terlalu mempengaruhi jalannya program yang telah di susun. Pada tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun dan diatur berdasarkan program yang sudah tercantum dalam rencana strategis pada RPJDM Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024. Adapun saran dari penulis yaitu agar dapat meningkatkan lagi kinerja pegawai namun tetap sesuai prosedur yang sudah diatur dalam Perda dan juga RPJMD sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan memuaskan.

3.1.1.2 Sasaran

Sasaran adalah target spesifik dan dapat ditindaklanjuti yang perlu dicapai dalam kerangka waktu yang lebih kecil, seperti satu tahun atau kurang, untuk mencapai objektifitas tertentu yang menggambarkan tindakan atau kegiatan yang terlibat dalam mencapai tujuan. Sejauh ini sasaran yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan daerah ini ialah bagaimana konsistensi dari perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan memperhatikan indikator-indikator dengan menggunakan strategi dan kebijakan yang sudah diatur dengan melaksanakan penyusunan dokumen Pere masih perlu adanya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dalam mencapai sasaran yang ingin dituju.ncanaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. dalam mencapai tujuan dan sasaran ini sudah terhitung baik, dan adanya beberapa kebijakan-kebijakan untuk menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi *Stakeholder* pembangunan daerah. Adapun saran dari penulis yaitu perlu adanya peningkatan kinerja oleh aparatur serta inovasi daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah sehingga perealisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dapat maksimal.

3.1.1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang- undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya. Dalam pelaksanaannya penulis hanya berhasil mendapatkan informasi dari 3 (tiga) orang informan yang ada dalam pedoman wawancara terdapat 6 (enam) informan karena adanya keterbatasan waktu dan situasi dilapangan untuk menjadi data primer dalam menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah dicantumkan berdasarkan Undang-Undang No 25

Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional yang menjadi dasar hukum dalam sistem perencanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta OPD yang terkait. UU yang telah diatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menghambat dalam inovasi maupun merevisi kebijakan regulasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. dasar hukum yang mengatur sistem penyelenggaraan ini memiliki pondasi yang kuat sehingga mampu mengatur kebijakan-kebijakan yang ada dengan tidak adanya penyelewengan yang dilakukan oleh perangkat daerah. Adapun saran dari penulis yaitu ada baiknya melakukan evaluasi terhadap program yang sudah diagendakan apakah sudah sesuai dengan dasar hukum ataupun peraturan yang berlaku serta memberi peningkatan ataupun pembaharuan berdasarkan evaluasi tersebut.

3.1.2 Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Integrasi menyangkut sosialisasi dan prosedur peningkatan.

3.1.2.1 Prosedur Peningkatan

Prosedur Peningkatan secara sederhana adalah suatu petunjuk tertulis yang menjelaskan tentang langkah-langkah kerja atau bagaimana melakukan aktivitas rutin. Dalam pelaksanaannya penulis berhasil mendapatkan informasi dari 3 (tiga) orang informan yang ada dalam pedoman wawancara untuk menjadi data primer dalam menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. prosedur peningkatan sangat perlu diadakan mengingat masih adanya kekurangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. perlunya peningkatan dari tahun ke tahun dengan mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD yang berkaitan sehingga prosedur peningkatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. prosedur peningkatan harus dievaluasi secara berkala dan terperinci sehingga dalam pelaksanaan prosedur tersebut dapat benar-benar memberikan dampak ataupun pengembangan yang baik terhadap sumber daya aparatur. Adapun saran dari penulis yaitu pemerintah daerah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan prosedur peningkatan sumber daya, contohnya dengan melakukan kegiatan tahunan ataupun rapat daerah (musrenbang)

3.1.2.2 Proses Sosialisasi

Sosialisasi ialah suatu proses memperkenalkan sistem pada seseorang sebelum sistem tersebut diterapkan dan dilaksanakan, karena hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan sistem ini oleh para user. Dalam pelaksanaannya penulis berhasil mendapatkan informasi dari 3 (tiga) orang informan yang ada dalam pedoman wawancara untuk menjadi data primer dalam menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyampaian sosialisasi inipun tidak hanya disampaikan secara langsung namun, di lakukan juga melewati website yang ada agar seluruh unsur masyarakat dapat mengakses dan mengetahui apa saja informasi yang disediakan. Sehingga dalam hal pengkoordinasian tidak adanya *misscommunication* sehingga dalam pelaksanaan yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. sosialisasi yang dilakukan sangat diperlukan, untuk menghindari beberapa kesalah pahaman sehingga dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya layanan pengaduan dan informasi yang sudah disediakan di website, maka masyarakat dapat dengan mudah mengakses data dan jaringan sehingga tidak adanya ketertutupan informasi terhadap masyarakat, ini juga salah satu misi dari pemerintah daerah yaitu kinerja yang transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari apabila terjadi kesalahan.

3.1.3 Adaptasi

Proses adaptasi memungkinkan untuk selalu mengikuti terus perkembangan yang ada di zaman modern saat ini, sehingga hasilnya diharapkan lebih transparan serta akuntabel.

3.1.3.1 Peningkatan Kemampuan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan dan keterampilan dari seluruh unsur sangat diperlukan dalam mencapai suatu keefektifan, terutama Bappedalitbang. Dalam pelaksanaannya penulis hanya berhasil mendapatkan informasi dari 3 (tiga) orang informan yang ada dalam pedoman wawancara terdapat 6 (enam) informan karena adanya keterbatasan waktu dan situasi dilapangan untuk menjadi data primer dalam menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. peningkatan kemampuan diperlukan bukan hanya untuk sekedar mengasah kemampuan sumber daya aparatur namun juga sebagai tolak ukur kinerja apakah dengan kemampuan yang ada mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif. kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai bappedalitbang sudah sesuai dengan ilmu dan kemampuannya, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah ini bisa dikatakan lancar dan hanya perlu dikembangkan lebih baik lagi. pegawai yang ada dituntut harus mampu memberikan inovasi dan ide-ide untuk memecahkan masalah dengan cara yang kreatif sesuai dengan kemampuan. butuh ide maupun inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing untuk meningkatkan kemampuan dengan mengasah keahlian dalam *softskill* dan *hardskill*. Adapun saran dari penulis yaitu perlu dijalkannya beberapa program yang dapat mengasah dan mengacu meningkatkan kemampuan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3.1.3.2 Sarana dan Prasarana

Agar dapat berjalan dengan efektif, maka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini harus didukung juga oleh sarana dan prasarana yang memadai. fasilitas sarana dan prasarana di kantor bappedalitbang, mengalami beberapa kendala khususnya di jaringan internet. Namun, masalah itu tidak terlalu menghambat hanya saja memperlambat kinerja pegawai bappedalitbang. Berdasarkan ketiga hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana memadai dan mampu berfungsi dengan baik dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan. Adapun saran dari penulis yaitu perlu adanya evaluasi lagi dalam pengembangan serta perbaikan sarana dan prasana yang masih kurang khususnya jaringan internet dan beberapa inventaris agar dalam penyelenggaraan di kemudian hari dapat berjalan dengan efektif.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Anjely Mira Kogoya (2017) dengan judul “Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Konflik Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.” Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Pencapaian dari nilai produktivitas pemerintah daerah yang diukur melalui tingkat realisasi program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah Kabupaten Tolikara, masih belum optimal. Adius Faroqi, Hasbullah Malau (2020) dengan judul” Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Data” . adapu temuan hasil peneluitannya yakni Efektivitas Nagari bahwasanya BPRN Tapi Selo belum efektif karena dapat dilihat dari beberapa indikator; Indikator input, BPRN Nagari Tapi Selo hanya memiliki dana, sumber daya manusia, dan waktu. Indikator process, ketepatan dan keakuratan Kinerja BPRN Tapi kinerja dari kegiatan BPRN telah tercapai karena bisa terciptanya peraturan nagari dan APBN Nagari, sedangkan kecepatan BPRN belum maksimal. Indikator output, melakukan kegiatan musyawarah dengan wali nagari memiliki peraturan nagari anggaran

nagari penetapan APBNagari. Indikator outcomes, BPRN Tapi Selo baru menghasilkan hasil tentang dan kegiatan jangka pendek berbentuk peraturan nagari dan APBNagari yang belum mencakup kepentingan banyak di hak, untuk kegiatan jangka menengahnya belum ada. Indikator benefit, manfaat dari kegiatan jangka pendek adalah niagari mendapatkan anggaran nigari dari hasil penetapan APBNagari, sedangkan manfaat jangka menengah belum dirasakan. Indikator impact, kegiatan dari BPRN memiliki dampak positif dan kegiatan BPRN Tapi Selo tidak ada yang merugikan. nagari. Berdasarkan aspek efektifitas, aspek tugas dan fungsi. BPRN Tapi Selo telah melaksanakannya dan beberapa yang belum terlaksana dengan baik. Ariel- Sharon- Sumenge (2013) dengan judul” Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Bappeda Minahasa Selatan”, Adapun temuan penelitiannya bahwa Tingkat- dan- kriteria Efektifitas Anggaran Belanja Bappeda Minahasa Selatan tahun 2008 – 2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas paling tinggi terjadi pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2011. Anggaran belanja pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 dapat dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011, keefektivitasannyakurang akibat anggaran yang berbeda jauh dari target anggaran yang harus dicapai. Perbedaan terjadi akibat adanya serangkaian kegiatan yang dianggarkan, tetapi tidak dilaksanakan. Namun, kegiatan lain yang sudah dianggarkan, dilaksanakan secara efektif. Kabupaten Minahasa Selatan menilai, bahwa kegiatan yang sudah direncanakan telah terealisasi dan sesuai dengan tujuan pencapaian, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni : data yang penulis dapatkan, penulis memperoleh informasi bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas sudah optimal akan tetapi hasil akhir masih terdapat beberapa kendala.

IV. KESIMPULAN

Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah; Pencapaian Tujuan (a) Kurun Waktu :Tingkat kualitas efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Gunung Mas sudah baik dan tidak diragukan lagi meski ada terdapat beberapa kendala yang ditemukan namun tidak terlalu mempengaruhi jalannya program yang telah di susun. Pada tahapan pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan daerah disusun dan diatur berdasarkan program yang sudah tercantum dalam rencana strategis pada RPJDM Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024. (b) Sasaran :Dalam mencapai tujuan dan sasaran ini sudah terhitung baik, dan adanya beberapa kebijakan-kebijakan untuk menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi *Stakeholder* pembangunan daerah.(c) Dasar Hukum:Dasar hukum yang mengatur sistem penyelenggaraan ini memiliki pondasi yang kuat sehingga mampu mengatur kebijakan-kebijakan yang ada dengan tidak adanya penyelewengan yang dilakukan oleh perangkat daerah.Integrasi (a) Prosedur Peningkatan: prosedur peningkatan harus dievaluasi secara berkala dan terperinci sehingga dalam pelaksanaan prosedur tersebut dapat benar- benar memberikan dampak ataupun pengembangan yang baik terhadap sumber daya aparatur. (b) Proses Sosialisasi : Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pemerintah ini sangat memperhatikan dan menunjukan adanya fasilitas untuk menyampaikan sosialisasi agar koordinasi yang terjalin mampu berjalan dengan baik dan lancar terhadap semua unsur yang ada demi kemajuan dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adaptasi (a) Peningkatan Kemampuan: Butuh ide maupun inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing untuk meningkatkan kemampuan dengan mengasah keahlian dalam *softskill* dan *hardskill* (b) Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana memadai dan mampu berfungsi dengan baik dalam menunjang

proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Simangunsong saja Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adius Faroqi, Hasbullah Malau.(2020).Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Data.
- Anjely Mira Kogoya.(2017).Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Konflik Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.
- Ariel,Sharon,Sumenge.(2013).Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Bappeda Minahasa Selatan.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta
- Simangunsong, Fernandes. 2021. Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah, Bandung: ALFABETA, cv